

## Analisis Efektivitas Pengelolaan APBD dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021 – 2023

Rika Adelia Sari<sup>1</sup>, Rindra Monica Kusumastuti<sup>2</sup>, Yasmin Aulia Tsabita<sup>3</sup>, Zahrani Farah Maisun<sup>4</sup>, Yuliana Ristantya Ningsih<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Demografi dan Pencatatan Sipil, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

### ARTICLE INFO

**Keywords:** *efektivitas, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemiskinan, program antisipasi resesi, kebijakan fiskal*

Article history

Submitted: 11-04-2025

Accepted: 03-05-2025

Revised: 15-05-2025

Available online: 01-06-2025

Published regularly:

June 2025

\*Corresponding Author

Email adress:

[rikaadelia970@gmail.com](mailto:rikaadelia970@gmail.com)

### ABSTRACT

*Penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dalam menurunkan tingkat kemiskinan pada periode 2021–2023. Metode kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi realisasi anggaran belanja serta program penanggulangan kemiskinan, termasuk program antisipasi resesi ekonomi. Data diperoleh dari laporan realisasi anggaran, dokumen APBD, dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan APBD DKI Jakarta mencapai rata-rata 88,21%, dengan kriteria "cukup efektif". Sementara itu, efektivitas anggaran bantuan sosial mencapai 97,22%, meskipun masih terdapat ketidaktepatan sasaran. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan seperti koordinasi antar instansi, validitas data penerima manfaat, dan transparansi dalam pelaksanaan program. Temuan ini menyoroti pentingnya perbaikan dalam akuntabilitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran guna memperkuat dampak program pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.*

**How to Cite:** Sari, R. A., Kusumastuti, R. M., Tsabita, Y. A., Maisun, Z. F., & Ningsih, Y. R. (2025). Analisis Efektivitas Pengelolaan APBD dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021 – 2023. *EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, 4(1), 78-88. DOI: <http://doi.org/10.20961/evokasi.v4i1.2423>

### INTRODUCTION

Kemiskinan hingga saat ini tetap menjadi salah satu isu utama yang terus dibahas dalam berbagai forum nasional maupun internasional, karena hampir di setiap negara, baik maju maupun berkembang, memiliki penduduk miskin yang membutuhkan perhatian serius. Seorang penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2021). Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara adalah melalui belanja negara. DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis Indonesia. Dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi terhadap nasional, efektivitas pengelolaan APBD di Jakarta menjadi tolok ukur penting dalam kebijakan fiskal daerah dan nasional.





Gambar 1. Grafik Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 – 2023  
(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta)

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan dari 4,72% pada Maret 2021 menjadi 4,69% pada Maret 2022. Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta per Maret 2023 turut terkerek membaik menjadi sebesar 4,44%. Pencapaian tersebut tercatat jauh lebih baik dibandingkan Nasional (9,36%). Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan kemajuan yang positif selama rentang tahun 2022 hingga 2023. Sebanyak Rp 17,76 triliun dari APBD Tahun 2023 dialokasikan untuk belanja yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Secara proporsi, total alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di tahun 2023 mencapai 22,32% dari total APBD. Proporsi tersebut naik 0,54 persen poin dibandingkan tahun 2022. Dari nilai total belanja penanggulangan kemiskinan tersebut, telah terealisasi sebesar Rp 16,94 triliun atau 95,37%. Di samping berbagai capaian dalam penanggulangan kemiskinan, Provinsi DKI Jakarta secara umum juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, di antaranya ketepatan sasaran berbagai program, validitas data sasaran sebagai basis penetapan berbagai program, dan sinergi dan keterpaduan program, baik antara program Pusat dengan program daerah maupun antar program daerah yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.

Meskipun alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk program penanggulangan kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan belum menunjukkan penurunan yang signifikan secara berkelanjutan. Hal ini membuat efektivitas pengelolaan APBD dalam menurunkan tingkat kemiskinan masih menjadi pertanyaan. Kompleksitas dalam pelaksanaan program-program sosial seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya validitas data penerima manfaat, serta lemahnya sinergi antar instansi pemerintah menjadi hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengeluaran anggaran. Kondisi ini menimbulkan permasalahan utama: apakah alokasi dan pengelolaan APBD yang besar tersebut telah dikelola secara efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan kemiskinan? Dengan mempertimbangkan berbagai program yang telah diluncurkan, termasuk program antisipasi resesi ekonomi, masih dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah program-program tersebut benar-benar berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara nyata selama tahun 2021 hingga 2023.

Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan APBD dalam menurunkan kemiskinan sangat penting agar alokasi anggaran yang signifikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Mengingat peran strategis Jakarta, hasil penelitian ini berpotensi memberikan masukan berharga tidak hanya bagi DKI Jakarta, tetapi juga daerah-daerah lain yang menjadikan Jakarta sebagai rujukan kebijakan fiskal. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada efektivitas bantuan sosial atau pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan dalam menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan secara spesifik menganalisis efektivitas program antisipasi resesi ekonomi sebagai salah satu program prioritas APBD DKI Jakarta, dan kontribusinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan selama 2021–2023.

Menurut Halim (2007), APBD berfungsi tidak hanya sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memajukan kesejahteraan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan APBD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Todaro dan Smith (2015) mengemukakan bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan akses kesehatan, keterpinggiran sosial, dan lemahnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2010), efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya dan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa memperhitungkan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks kebijakan publik dan pengelolaan anggaran, efektivitas mengacu pada sejauh mana output dan outcome dari suatu program mampu menjawab permasalahan yang ada. Jika dikaitkan dengan APBD, maka efektivitas berarti sejauh mana penggunaan anggaran publik mampu memberikan hasil nyata sesuai tujuan, seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, atau pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan anggaran publik dalam penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Suryadarma et al. (2020), alokasi APBD yang tepat sasaran berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan, terutama melalui program-program bantuan sosial. Penelitian ini juga menekankan bahwa efektivitas program sangat tergantung pada ketepatan data dan sasaran. World Bank (2022) menunjukkan bahwa program bantuan langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam mengurangi kemiskinan jangka pendek, tetapi belum mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya desain program yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif, seperti pelatihan ketenagakerjaan dan dukungan bagi pelaku usaha mikro. Sementara itu, penelitian oleh Nurhadi dan Setiawan (2019) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pengeluaran daerah yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Namun, penulis juga mencatat bahwa efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan daerah dan koordinasi antar instansi.

Studi oleh Lestari dan Ramadhan (2021) mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan di Surabaya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Keterlibatan masyarakat dinilai memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan efektivitas program sosial. Meskipun berbagai studi telah membahas hubungan antara anggaran daerah dan kemiskinan, penelitian yang secara khusus menyoroti efektivitas program antisipasi resesi ekonomi dalam kerangka APBD masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji bagaimana salah satu program prioritas dalam APBD DKI Jakarta tahun 2021–2023, yaitu program antisipasi resesi ekonomi, berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan APBD DKI Jakarta dalam menurunkan tingkat kemiskinan selama Tahun beberapa Tahun yaitu pada tahun 2021–2023 dan mengevaluasi peran program antisipasi resesi ekonomi dalam membantu pengentasan kemiskinan di Jakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan APBD dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta pada Tahun 2021 - 2023”.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih detail mengenai efektivitas pengelolaan APBD dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Jakarta pada tahun 2021 - 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan studi literatur dengan mengumpulkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan sebagai sumber informasi penelitian. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data sekunder dengan mengumpulkan data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Jakarta yang menggunakan studi time series, yaitu data ada pada rentetan waktu tertentu pada tahun 2021 - 2023, dokumen APBD Jakarta, laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Jakarta, data publikasi BPS, serta data publikasi lainnya.

Teknik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio efektivitas. Menurut Amanda dkk. (2021) rasio efektivitas diukur dengan membandingkan kinerja dan anggaran. Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas dapat diklasifikasikan menggunakan kriteria persentase kinerja keuangan daerah menurut standar yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan :

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Tahun 1996 dalam Susanto (2014)



### Kerangka Berpikir Penelitian



## RESULTS AND DISCUSSION

### 1. Pengelolaan Alokasi APBD di Provinsi DKI Jakarta

Pengelolaan alokasi APBD dapat mendukung dalam penanggulangan kemiskinan. Bisa dilihat bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga pada tahun 2021 - 2023.

Gambar 2. Grafik Persentase Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 - 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Hal ini didukung juga karena wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat aktivitas ekonomi yang padat penduduk. Kebijakan terkait pengalokasian dana APBD mencerminkan bahwa program terkait penanggulangan kemiskinan diambil alih oleh pemerintah daerah, untuk pengalokasian dana juga memperhatikan kondisi yang terjadi di masyarakat guna mengatasi permasalahan yang sering terjadi seperti permasalahan kemiskinan. Efektivitas kebijakan dapat diukur dari sejauh mana alokasi dana tersebut terealisasi dan juga sejauh mana alokasi dana tersebut mampu memenuhi masyarakat sehingga mampu mengubah atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta alokasi APBD yang digunakan yaitu anggaran belanja. Efektivitas keuangan daerah dihitung dengan cara menggunakan rasio perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja yang ditetapkan APBD, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Perhitungan rasio ini tujuannya untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun target anggaran belanja dan bagaimana realisasinya. Sehingga semakin minimal rasio perbandingan realisasi belanja dibandingkan target anggaran belanja maka semakin efektif dalam pengelolaan keuangannya. Berikut ini tabel yang menggambarkan perkembangan Efektivitas Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 – 2023.

#### Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 – 2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat efektivitas (%)	Kriteria
1.	2021	69.605.015.911.264	61.231.460.250.253	87,97%	Cukup efektif
2.	2022	76.487.403.736.118	64.380.358.560.086	84,17%	Cukup efektif
3.	2023	71.788.440.132.086	66.414.163.147.914	92,51%	Cukup Efektif
RATA - RATA				88,21 %	Cukup efektif

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 – 2023)

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas anggaran belanja daerah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2021 tingkat efektivitasnya sebesar 87,97 sehingga kriterianya mencapai cukup efektif. Kemudian di tahun 2022 menurun menjadi 84,17% dengan kriteria yang cukup efektif dan di tahun 2023 tingkat efektivitasnya naik kembali sebesar 92,51% sehingga kriterianya menjadi cukup efektif. Berdasarkan perhitungan efektivitas DKI Jakarta tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata yang didapat selama Tahun 3 tahun terakhir dari data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DKI Jakarta sebesar 88,21% dengan hasil kinerja yang cukup efektif. Hal ini membuktikan bahwa angka capaian ini mengindikasikan bahwa efektivitas pemerintah Daerah DKI Jakarta semakin Efektif dari tahun ke tahun walaupun sering terjadi fluktuasi setiap tahunnya. 83



Anggaran belanja di daerah DKI Jakarta pada Tahun 2021 – 2023 berfokus pada 3 program prioritas seperti penanganan banjir, penanganan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan di daerah DKI Jakarta sehingga perlunya perencanaan dan penganggaran daerah yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat untuk menekan angka penurunan permasalahan tersebut khususnya permasalahan kemiskinan yang sangat rentan terjadi.

### **Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Untuk Bantuan Sosial dalam menanggulangi Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 - 2023**

Salah satu kunci untuk memberantas kemiskinan yaitu dengan mengefektifkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial dapat berupa KPJ (Kartu Peserta Jamsostek), BST (Bantuan Sosial Tunai), KLJ (Kartu Lansia Jakarta), KAJ (Kartu Anak Jakarta), KPDJ (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta), BLT (Bantuan Langsung Tunai), PDP (Program Dana Pendanaan), dan bentuk lainnya yang bersifat pro-poor spending yang bersifat progresif absolut, yaitu pengeluaran yang memihak dan dikhususkan untuk masyarakat miskin. Bantuan sosial ini disalurkan untuk membantu masyarakat miskin serta sebagai penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat digunakan untuk dikelola sendiri maupun sebagai penunjang usaha bagi masyarakat. Pada kenyataan banyak bantuan sosial yang salah sasaran dalam penyalurannya di mana banyak keluarga yang tidak mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan dan banyak keluarga mampu yang malah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Banyak ditemukan masyarakat miskin yang belum merasakan manfaat dari bantuan sosial pemerintah akibat dari ketidaktepatan penyaluran tersebut. Berikut ini tabel yang menggambarkan perkembangan Efektivitas Anggaran Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial di Provinsi Jakarta Tahun 2021 – 2023.

No	Tahun	Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat efektivitas (%)	Kriteria
1.	2021	6.859.904.339.304	6.528.360.208.967	95,17%	Cukup efektif
2.	2022	5.115.246.523.00	5.035.404.985.74 9	98,44%	Cukup efektif
3.	2023	4.450.476.435.774	4.363.641.476.66 8	98,05%	Cukup efektif
RATA - RATA				97,22%	Cukup efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 - 2023



Gambar 3. Grafik Anggaran Bantuan Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 – 2023  
(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 – 2023)

Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa hasil perhitungan efektivitas realisasi anggaran untuk bantuan sosial di DKI Jakarta pada periode 2021 – 2023 menunjukkan angka fluktuatif dengan keterangan tingkat efektivitasnya cukup efektif. Selanjutnya di tahun 2021 tingkat efektivitasnya menunjukkan angka 95,17% yang artinya cukup efektif. Lalu di tahun 2022 mengalami kenaikan dengan menunjukkan angka 98,44% hal ini dapat diartikan juga tingkat efektivitasnya cukup efektif. Dan di tahun 2023 mengalami penurunan tingkat efektivitasnya menjadi 98,05% dengan artian masih cukup efektif. Naik turunnya tingkat efektivitas anggaran disebabkan oleh realisasi anggarannya tidak sesuai dengan anggaran. Supaya bisa tercapainya angka efektif maka perlu adanya koordinasi ataupun kerja sama antara pegawai di setiap bidang maupun antara pihak yang berwenang dalam pengambilan kebijakan dengan membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan untuk mencapai angka efektivitas.

Berdasarkan kinerja penganggaran daerah DKI Jakarta Tahun 2021- 2023. Kesimpulan dari rata – rata yang didapatkan pada 3 Tahun dari data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan angka sebesar 97,22% dengan hasil kinerja yang cukup efektif. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta sudah melaksanakan realisasi anggaran dengan cukup baik dalam anggaran belanja khususnya anggaran bantuan sosial.

### 3. Faktor Faktor yang Mempengaruhi dalam Realisasi APBD

Menurut Hadriyanus Suharyanto (dalam Wahyudi Kumorotomo, *et al.*, 2005:16) Faktor - faktor yang mempengaruhi dalam realisasi APBD antara lain transparansi, akuntabilitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Faktor faktor tersebut menjadi landasan dalam mengevaluasi penggunaan anggaran agar mampu menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

- **Transparansi**

Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi anggaran harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Transparansi anggaran sangat mempengaruhi realisasinya, terlebih lagi transparansi di bidang keuangan. Masyarakat bisa ikut mengawasi apakah dana untuk program kemiskinan benar-benar digunakan sesuai tujuan. Apabila segala aktivitas keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, diketahui oleh publik maka, kecil kemungkinan untuk pejabat publik yang berwenang melakukan kecurangan dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

- **Akuntabilitas**

Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan dana APBD kepada publik, termasuk bagaimana dan sejauh mana dana digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Pemerintah harus menjamin bantuan sosial yang diberikan tepat waktu, cukup jumlahnya, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga miskin. Dimana bila pertanggung jawaban mengenai seluruh kegiatan baik itu dari segi perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan tidak dapat dipertanggung jawabkan pemerintah inilah yang nantinya akan menimbulkan benih-benih KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

- **Ekonomis**

Ekonomis berarti penggunaan anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, yaitu mencapai hasil maksimal dengan sumber daya seminimal mungkin. Dalam konteks APBD, ini berarti setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Program pengentasan kemiskinan yang ekonomis akan memungkinkan lebih banyak penerima manfaat dengan dana yang sama. Efisiensi memungkinkan pengalokasian anggaran untuk berbagai sektor pendukung pengurangan kemiskinan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. APBD adalah sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan penanggulangan kemiskinan sangat besar maka, penting untuk menggunakan anggaran secara hemat dan efisien.

- **Tepat sasaran**

Tepat sasaran berarti program atau kebijakan yang dibiayai melalui APBD benar-benar menysasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, yaitu penduduk miskin dan rentan miskin. Ketidaktepatan sasaran akan menyebabkan inefisiensi, karena dana digunakan untuk orang yang tidak seharusnya menerima bantuan. Banyak program pengentasan kemiskinan gagal bukan karena kurangnya dana, tetapi karena penerima manfaat bukan kelompok yang sebenarnya membutuhkan.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta selama periode 2021–2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan APBD cukup efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, dengan rata-rata efektivitas sebesar 88,21% untuk anggaran belanja secara umum dan 97,22% untuk belanja bantuan sosial.



Namun, masih ditemukan sejumlah tantangan seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial, kurangnya validitas data, serta minimnya koordinasi antarinstansi yang menghambat optimalisasi dampak program-program pengentasan kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan dari 4,72% (Maret 2021) menjadi 4,44% (Maret 2023) menunjukkan adanya dampak positif, tetapi belum cukup signifikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program sosial, terutama dalam konteks program antisipasi resesi ekonomi yang menjadi salah satu prioritas APBD di Provinsi DKI Jakarta.

## BIBLIOGRAPHY

- Amalia, G. S., Putri, J. A., & Zahira, A. A. (2025). Analisis Pengukuran Kinerja Efisien dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2023. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 61-71.
- Amanda, R., Arief, K., & Ishak, J. F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52-62.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 (Audited). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2023). Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 (Audited). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 (Audited). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2022). Garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta (tahun 2022). BPS Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2022). Profil penerima bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. BPS Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id>
- Fadilah, M. N., & Dian Anita. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2457–2466. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2644>
- Halim, A. (2007). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Jakarta, P. B. (2024, November 12). Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus. A,E. (Ed). 2005. Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya. MAP-UGM. Yogyakarta
- Mahmudi. (2010). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023, Februari). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2024. Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 - 2024. PPID Provinsi DKI Jakarta. 9 Juni 2025. PPID DKI Jakarta.



- Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015–2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 1-10.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 1–10.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan. Jakarta
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-13.
- Saridewi, A. A. A. N., Noak, P. A., & Supriyanti, N. W. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (Studi Kasus: Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2013). *Citizen Charter*, 1(2), 28611.
- Sumenge, AS. (2013). Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan, *Jurnal EMBA*, 1(3):74-81.
- Susanto, H. (2014). Analisis perkembangan kinerja keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Repository. Ut. Ac. Id.* <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324>, 4.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development (12th ed.)*. Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Keuangan Daerah.
- Widodo, A. A., Riyanti, D. A., Dani, F. R., Abdillah, M. E., & Siboro, S. F. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 319-329.